

IMPLEMENTASI TATA KELOLA ORGANISASI DAN MANAJEMEN RISIKO REPUTASI PADA ORGANISASI NIRLABA (STUDI KASUS GEREJA BNKP JEMAAT KOTA PADANG)

Somah Taufik Halawa

Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: somahtaufikhalawa@gmail.com

Abstrak: Gereja sebagai organisasi nirlaba harus mampu mempertahankan reputasinya untuk memastikan dukungan para pihak dalam keberlangsungan organisasai dengan cara penerapan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik atau *good corporate governance*. Untuk mempertahankan reputasinya, gereja harus mampu mengelola risiko reputasinya dengan pendekatan manajemen risiko reputasi. Pendekatan *stakeholder theory* untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan harapan mereka terhadap pengelolaan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Gereja BNKP Jemaat Kota Padang dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan manajemen risiko reputasi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Gereja BNKP Jemaat Kota Padang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi melalui aturan Tata Pranata Gereja dan pengendalian manajemen risikonya dijalankan dengan berbagai kebijakan namun tidak memiliki sistem manajemen risiko yang disusun baik atau memiliki *risk register*.

Kata kunci: Tata Kelola Organisasi, risiko reputasi, gereja, *stakeholder theory*

Abstract: *The church as a non-profit organization must be able to maintain its reputation to ensure the support of the parties in the sustainability of the organization by applying the principles of good corporate governance. To maintain its reputation, the church must be able to manage its reputation risk using a reputation risk management approach. Stakeholder theory approach to identify stakeholders and their expectations of organizational management. This study aims to observe the BNKP Jemaat Kota Padang Church in implementing the principles of good corporate governance and reputation risk management. The method used is descriptive qualitative method. The results of the study show that the BNKP Jemaat Kota Padang Church applies the principles of organizational governance through the rules of Church Administration and its risk management controls are carried out with various policies but do not have a well-developed risk management system or have a risk register.*

Keywords: *Good Corporate Governance, risk reputation, church, stakeholder theory*

PENDAHULUAN

Gereja BNKP Jemaat Kota Padang sebagai organisasi tentu memiliki pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaannya, baik organisasi yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun organisasi yang bersifat sosial atau keagamaan memiliki pertanggungjawaban terhadap para pihak pemegang kepentingan di organisasi tersebut. Pengelola organisasi dituntut memiliki keterbukaan atas pekerjaan yang dilakukannya dalam menjalankan roda organisasi. Organisasi agama seperti gereja juga tidak luput dari tuntutan atas keterbukaan pengelola organisasi terhadap para pihak pemangku kepentingan. Gereja merupakan organisasi nirlaba yang dalam pengelolaannya menghimpun dana serta sumber daya lainnya dari jemaat dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan pada organisasi tersebut untuk keberlangsungan dan tercapainya

tujuan organisasi sebagai organisasi keagamaan. Pada pengelolaannya, pengurus harus mampu memenuhi kepercayaan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk tetap memastikan dukungan para pihak dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi (Ghozali dan Chariri, 2007). Kepercayaan terhadap pengelola dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari asumsi filosofis bahwa pengurus tersebut dapat dipercaya, mampu bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran (Chinn, 2000). Dampak atas ketidakmampuan pengurus dalam mengelola organisasi dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan anggota organisasi maupun para pihak lainnya yang menimbulkan efek berkurangnya dukungan sumber daya dari para pihak, hal tersebut dapat menjadi penghalang terwujudnya tujuan organisasi. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan *good corporate governance* untuk mengidentifikasi pengendalian manajemen risiko serta *stakeholder theory* menjadi instrumen yang mengidentifikasi para pemangku kepentingan serta harapan mereka terhadap pengelolaan organisasi baik penerapan prinsip *good corporate governance* serta manajemen risiko reputasinya. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana Gereja BNKP Jemaat Kota Padang menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan juga melihat bagaimana organisasi mengelola manajemen risiko reputasinya.

Kerangka Teori

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance sebagai instrumen tata kelola organisasi sangat penting penerapannya untuk memastikan keberlangsungan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan (Kaihatu, 2006). Pada penelitian Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai (Irianto, M.F, 2019) menemukan penerapan *Good Corporate Governance* pada pengelolaan wakaf tunai melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan pada penelitian tersebut hanya menggunakan akuntabilitas dan transparansi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan lima prinsip *good corporate governance* untuk mengidentifikasi seluruh penerapan tata kelola organisasi pada gereja BNKP Jemaat Kota Padang.

Manajemen Risiko

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05./2021 memberikan pengertian risiko reputasi adalah dampak yang diterima oleh organisasi yang disebabkan oleh persepsi negatif pemangku kepentingan sehingga menurunkan tingkat kepercayaan mereka. Tujuan manajemen risiko sendiri adalah mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian akibat risiko reputasi perusahaan. Penerapan manajemen risiko dimulai dari proses identifikasi risiko reputasi, pengukuran risiko reputasi, pengendalian risiko reputasi, pemantauan risiko reputasi melalui *risk register*, dan sistem informasi manajemen risiko bagi risiko reputasi. Pada penelitian (Sholehah, et al, 2019) Lembaga Zakat Nasional (Laznas) Yayasan Nurul Hayat Dalam Melakukan Manajemen Risiko Reputasi menemukan faktor eksternal tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap reputasi institusi. Pada penelitian Manajemen Risiko Reputasi Pada Bank Syariah (Arsyadona, et al, 2020) menunjukkan risiko reputasi berhubungan dengan risiko-risiko lainnya.

Stakeholder Theory

Stakeholder theory adalah teori yang mengarahkan pengelola atau manajemen mengerjakan hal-hal yang dianggap penting oleh *stakeholder* dan mampu melaporkan pertanggungjawabannya kembali (Fontaine, Haarman, dan Schmid, 2006). Hal senada juga diungkapkan (Ghozali dan Chariri, 2007) bahwa *stakeholder theory* mengatakan entitas tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya karena keberadaan suatu entitas sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada entitas tersebut. Sedangkan (Ousama, Fatima, dan Majdi, 2011) berpendapat teori *stakeholder* adalah konsep organisasi yang berupa argumentasi bahwa seluruh pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas organisasi. Syaifuddin (2016), pada penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba studi kasus pada Masjid se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan pendekatan *stakeholder theory*. Penelitian ini menggunakan pandangan *stakeholder theory* menurut Helena dan Threse (2005), yang menyatakan masyarakat merupakan *stakeholder* terpenting dan media memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas organisasi pada *stakeholder* dan media memiliki kekuatan untuk membeberkan informasi perusahaan, apabila perusahaan melakukan tindakan yang tidak pantas, maka media akan membeberkan keburukan perusahaan tersebut. Syaifuddin (2016) menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan dari masyarakat dan media dan *stakeholder* lainnya mempengaruhi tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1998). Pendekatan ini dipilih karena untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana akuntabilitas pada suatu organisasi gereja. Pada penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan, menganalisis, dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian. Penelitian diharapkan mampu meneliti dan menggambarkan mengenai subjek penelitian. Sehingga, penelitian ini didesain menggunakan studi kasus (*case study*). Sekaran (2006), mengatakan bahwa studi kasus yang bersifat kualitatif berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. Penelitian ini dilakukan di gereja BNKP Jemaat Kota Padang. Gereja BNKP Jemaat Kota Padang merupakan organisasi agama Kristen. Gereja BNKP Jemaat Kota Padang beralamat di Jl. Karya, Belakang Pd, Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, pengamatan, dan dokumentasi dengan instrument penelitian buku catatan dan *handphone*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Stakeholder* Organisasi Gereja Jemaat BNKP Kota Padang**

Stakeholder yang merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada organisasi gereja dapat diidentifikasi melalui hubungan keterikatan pada organisasi tersebut. Pada gereja BNKP Jemaat Kota Padang memiliki beberapa *stakeholder* yaitu anggota jemaat, Ketua dan Majelis Jemaat, sinode dan resort, pemerintah, dan masyarakat sekitar gereja.

Kepentingan setiap pihak berbeda-beda sesuai dengan seberapa jauh memiliki pengaruh terhadap organisasi gereja. Anggota jemaat, Ketua dan Majelis Jemaat, sinode dan resort adalah *stakeholder primer* sedangkan pemerintah dan masyarakat merupakan *stakeholder sekunder*. Wakka, Kadir, Afri, dan Hadi (2013) *stakeholders* terbagi berdasarkan keterkaitannya dalam pengambilan keputusan yaitu *stakeholder primer* dan *stakeholder sekunder*. *Stakeholder primer* adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung atau juga disebut *stakeholder kunci*, sedangkan *stakeholder sekunder* adalah pihak yang memiliki kepentingan secara tidak langsung.

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan diterapkan pada organisasi gereja BNKP Jemaat Kota Padang melalui Tata Prana Gereja yang merupakan acuan dalam menjalankan organisasi gereja. Berikut penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan menggunakan pendekatan *stakeholder theory*.

1. Transparansi

Anggota jemaat, ketua dan majelis jemaat, sinode dan resort sebagai *stakeholder primer* mengharapkan penerapan prinsip transparansi dengan cara program-program kerja disampaikan sejak awal tahun dan seluruh informasi yang berkaitan dengan organisasi disampaikan secara aktual. Sedangkan pemerintah dan masyarakat sebagai *stakeholder sekunder* mengharapkan prinsip transparansi dijalankan dengan cara menyampaikan jadwal-jadwal kegiatan ibadah atau hari-hari besar gereja sehingga pemerintah dan masyarakat menyikapi keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar selama kegiatan berlangsung. Pemenuhan harapan *stakeholder primer* diimplementasikan melalui program-program kerja yang disusun awal tahun dan disampaikan melalui warta jemaat, sedangkan pada pemenuhan harapan *stakeholder sekunder* diimplementasikan melalui pengumuman jadwal ibadah tetap di papan pengumuman gereja serta pemberitahuan kepada pihak pemerintah pada jadwal hari-hari besar gereja.

2. Akuntabilitas

Stakeholder primer mengharapkan pada penerapan prinsip akuntabilitas diimplementasikan dengan cara pelaporan keuangan dan laporan kegiatan pelayanan secara periodik baik secara bulanan, mingguan, semester, dan tahunan. Sedangkan *stakeholder sekunder* mengharapkan penerapan akuntabilitas dengan cara memberikan laporan keadaan organisasi sebagaimana organisasi masyarakat lainnya. Implementasi yang dilakukan untuk pemenuhan prinsip akuntabilitas adalah dengan menyampaikan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala melalui warta jemaat. Pemenuhan implementasi akuntabilitas pada *stakeholder sekunder* dengan cara memberikan laporan perkembangan jemaat secara kuantitatif melalui departemen agama Kota Padang.

3. Responsibilitas

Stakeholder primer dalam pemenuhan prinsip responsibilitas mengharapkan gereja sebagai organisasi agama mampu menjalankan tanggungjawabnya dalam pemenuhan kebutuhan spiritual anggotanya. Harapan *stakeholder primer*, gereja mampu bertanggungjawab atas keamanan, kebersihan, dan nyaman lingkungan sekitar gereja. Implementasi penerapan prinsip responsibilitas dilakukan dengan cara memastikan kegiatan rohani yang berkaitan dengan anggotanya dilaksanakan oleh petugas gereja. Hal lainnya yang berkaitan dengan tanggungjawab atas keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sekitar gereja dilakukan dengan memfalisitasi petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan sekitar gereja.

4. Kemandirian

Stakeholder primer mengharapkan dalam pemenuhan prinsip kemandirian, gereja tidak terpengaruh pada konflik kepentingan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan organisasi. Implementasi untuk memenuhi harapan tersebut, pengelola dalam membuat keputusan hanya berpedoman pada Tata Pranata Gereja dan hasil sidang majelis jemaat. *Stakeholder sekunder* dalam pemenuhan prinsip kemandirian mengharapkan organisasi gereja tunduk terhadap peraturan pemerintah yang berlaku, untuk memenuhi tersebut pengelola gereja selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaannya.

5. Kesetaraan

Pemenuhan prinsip kesetaraan, *stakeholder primer* mengharapkan pengelola berlaku adil dan setara dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan spiritual anggotanya. Implementasi kesetaraan dilakukan dengan cara memastikan pelayanan yang dilakukan oleh gereja terhadap anggotanya bergiliran dan sama sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Untuk pemenuhan harapan *stakeholder sekunder* dalam penerapan prinsip kesetaraan adalah memastikan hak-hak masyarakat sekitar seperti keamanan dan kebersihan lingkungan juga dapat diwujudkan oleh pengelola dan tidak hanya berfokus pada internalnya saja. Implementasi dalam pemenuhan hal tersebut, pengelola memastikan hak-hak tersebut dipenuhi dengan pengawasan berkala terhadap petugas yang telah ditetapkan.

Manajemen Risiko Reputasi

Pengelolaan manajemen risiko reputasi pada organisasi gereja BNKP Jemaat Kota Padang dapat diidentifikasi dan diukur melalui kejadian-kejadian pada penerapan prinsip *good corporate governance*. Namun, pada organisasi gereja BNKP Jemaat Kota Padang masih belum menerapkan sistem manajemen risiko yang sistematis, namun pengendalian risiko reputasi dilaksanakan disetiap kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Manajemen risiko reputasi pada organisasi Gereja BNKP Jemaat Kota Padang:

1. Identifikasi Risiko Reputasi

Untuk mendapatkan informasi risiko reputasi, pengelola mendengarkan aspirasi dari pengurus lainnya dan anggota jemaatnya serta saran-saran yang muncul disetiap rapat organisasi.

2. Mengukur Risiko Reputasi

Pengukuran risiko reputasi pada organisasi gereja BNKP Jemaat Kota Padang tidak dilakukan dengan kuantitatif atau menggunakan *risk map*. Pengukuran risiko reputasi diukur secara kualitatif melalui pengamatan pengelola.

3. Pengendalian Risiko Reputasi

Pengendalian risiko reputasi dilakukan dengan metode pemecahan masalah melalui rapat pengurus dan rapat majelis, sehingga tindakan yang dilakukan oleh pengelola berdasarkan hasil rapat dan berpedoman pada tata pranata gereja.

4. Pemantauan Risiko Reputasi

Pemantauan dilakukan pasca tindakan. Pengelola mengamati dampak dari tindakan atas pemecahan masalah sehingga dapat dievaluasi.

5. Sistem Manajemen Risiko Reputasi

Hal ini masih belum terdapat dalam manajemen risiko reputasi pada organisasi BNKP Jemaat Kota Padang disebabkan pengetahuan akan manajemen risiko oleh pengelola masih kurang sehingga tidak merasa menjadi penting dalam pengelolaan organisasi.

KESIMPULAN

Organisasi BNKP Jemaat Kota Padang dalam menjalankan organisasinya telah menerapkan tata kelola organisasi yang baik melalui implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Namun, berbeda halnya dengan penerapan manajemen risiko reputasi, BNKP Jemaat Kota Padang masih belum memiliki sistem manajemen risiko reputasi yang baik. Pengendalian atas risiko reputasi hanya dilakukan dengan cara pemecahan masalah tanpa di hitung secara kuantitatif dan dibentuk dalam *risk register*. Penerapan *good corporate governance* dengan baik juga menjadi faktor dalam memitigasi peluang terjadinya risiko reputasi, namun hal ini tidak cukup dalam pengelolaan manajemen risiko, sehingga BNKP Jemaat Kota Padang diharapkan untuk membentuk suatu sistem manajemen risiko reputasi untuk mengelola risiko reputasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chinn. (2000). *Corporate Governance, Handbook*. London : Gee Publishing Ltd.
Ditelusuri 19 Juni 2023 pada <https://www.coursehero.com>
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Helena dan Therese. (2005). *Stewardship Theory*. Harkes Ingvliid. Ditelusuri pada 17 Juni 2023
pada www.repository.umy.ac.id
- Irianto, M.F., (2019), Implementasi Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai, Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang
- Kaihatu, T.S., (2006), Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8, No.1, Maret: 1–9.
- Ousama, A. A., Fatima, dan Majdi. (2011). *Usefulness of intellectual capital information: prepares and users views. Journal of Intellectual Capital*, 12 (3), 430-445 pada <http://www.cutebetie.blogspot.com>
- Sholehah, N.A., dan Suprayogi, N, (2019), Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Nurul Hayat Dalam Melakukan Manajemen Risiko Reputasi, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No.2 Februari 2019*
- Syaifuddin, S. (2016). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Ditelusuri 18 Juni 2023
- Sekaran, Uma. (2003). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Buku 1 Edisi 4*. Terjemahan Yon, Kwan Men. 2006. Jakarta: Salemba Empat.
- Wakka, Kadir, Afri San Awang, dan Hadi Ris Purwanto. 2013. *Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusarung, Provinsi Sulawesi Selatan*. vol. 20, no. 1, hal 11-21



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License